

MENANG (GUH) KAN KEMBALI JATI DIRI BANGSA

Abd. Mu'id aris shofa

**Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Malang
Anggota Kelas Pemikiran dan Pendidikan Politik (KP3) Malang**

Realitas yang tidak dapat ditolak dari negara Indonesia adalah pluralitas, multikulturalitas, heterogenitas, kemajemukan, atau kebhinekaan di dalam struktur masyarakatnya baik dari suku, agama, ras, etnis, bahasa lokal dan lain-lain. Jauh sebelum Indonesia diproklamasikan, hakekat perbedaan-perbedaan itu sudah ada, dengan adanya realitas tersebut maka kita (Indonesia) harus menerima dua konsekwensi logis yaitu, positif dan negatif. Positif bisa diartikan sebagai kebaikan yang akan diterima jika bangsa Indonesia mampu mengelola dan mengakomodir perbedaan itu dengan baik, makna negatif diartikan sebaliknya yaitu akan melahirkan bencana maha dahsyat jika kita (Indonesia) tidak mampu mengelola dan mengakomodir dengan baik, sehingga melahirkan konflik horizontal ataupun vertikal dan tidak menutup kemungkinan akan mengarah kepada gerakan disintegrasi bangsa atau merusak tatanan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat kondisi keindonesiaan kita belakangan ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh anak bangsa, Adanya sebagian pihak yang masih mempertanyakan realitas keIndonesiaan dan menginginkan adanya kedudukan dominan dalam struktur kenegaraan sama dengan menciderai hakekat keIndonesiaan itu sendiri dan mengkhianati semangat perjuangan para pendiri bangsa.

Mari kita lihat kembali sejarah Indonesia kita, bagaimana bangsa ini terbentuk karena adanya kerelaan dan kesediaan segenap anak bangsa untuk tidak menuntut kedudukan dominan atau istimewa demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, peristiwa 1928 bisa dijadikan contoh pertama bagaimana tidak ada ego mayoritas dan minoritas, meskipun realitas itu tetap ada dalam kehidupan Indonesia. Dengan semangat persatuan yang kuat untuk menerima dan mengakui bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, seperti yang pernah dituliskan oleh Franz Magnis Suseno seandainya jong Djawa menuntut bahasa jawa dijadikan sebagai bahasa Indonesia, maka Indonesia tidak akan dipahami seperti

sekarang ini yaitu republik Indonesia tetapi dipahami sebagai republik Jawa Raya dan pastinya akan berakibat bahwa kaum Sunda, Batak, Minang dan lainnya sangat mungkin tidak ikut dalam integrasi tersebut. Peristiwa 1945 juga menjadi bagian penting dari sejarah bangsa, bagaimana kompromi segenap anak bangsa demi persatuan dan kesatuan mampu diwujudkan tanpa meninggalkan luka bagi sebagian komponen anak bangsa. Kesepakatan untuk menghapus tujuh kata merupakan pencapaian besar dari hasil kompromi para pendiri bangsa untuk membuktikan bahwa negara ini bukan milik dari sebagian kelompok atau golongan saja baik mayoritas, minoritas, superior dan inferior.

Para pendiri bangsa ini tentu sudah memikirkan hal-hal terkait realitas nyata dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu untuk menyatukan semua perbedaan-perbedaan tersebut harus dicari suatu formula yang sesuai dengan jiwa dan jati diri bangsa kita, maka disepakatilah Pancasila sebagai formulanya, 72 tahun Indonesia merdeka tidak selayaknya kita (Indonesia) memperdebatkan terkait dengan eksistensi Pancasila ataupun membandingkannya dengan agama. Sudah sangat jelas perbedaan keduanya bahwa Pancasila bukan agama dan tidak untuk menggantikan posisi agama, tetapi yang menjadi penting saat ini adalah bagaimana Pancasila tidak hanya bisa diajari dalam makna verbalis (hafalan) saja, tetapi harus bisa mengakarakan gagasan Pancasila itu ke dalam bumi kenyataan atau praksisnya. Atau meminjam istilah Kuntowijoyo perlu adanya radikalisme Pancasila dalam arti membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam semua aspek kehidupan dan ketatanegaraan. Dalam kehidupan politik Pancasila harus mampu dijadikan sebagai bintang pemandu untuk mewujudkan tata kehidupan politik yang religius, humanis, mengajak semangat persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat dan tentu harus mewujudkan azas keadilan tanpa keberpihakan. Sehingga politik tidak dimaknai sebagai alat untuk memperebutkan ataupun mempertahankan kekuasaan saja tanpa adanya alat pengendalinya yaitu Pancasila. Dalam bidang hukum juga demikian, ketika negara ini sudah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau tertib hukum maka harus bisa dalam praktiknya hukum pun juga harus mampu untuk tidak berpihak kepada siapapun. Sehingga adanya

persamaan dimuka hukum bisa diwujudkan dan hukum akan menjadi panglimanya.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA

Bagaimana kita saat ini bisa melihat dari indeks ketahanan nasional kita pada gatra ideologi yang ternyata dari tahun ke tahun mengalami suatu proses penurunan sehingga ketahanan ideologi kita menjadi kurang tangguh seperti pada *gatra* ideologi, hasil yang menunjukkan indeks kurang tangguh yang secara berturut-turut dilakukan oleh laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Labkurtannas) Lemhanas RI sejak tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, 2016 terus mengalami penurunan, dari nilai agregat 2,59 turun menjadi 2,58, kemudian menjadi 2,56 lalu 2,12, tahun 2015 jadi 2,23 dan tahun 2016 naik menjadi 2,60 walau tetap “kurang tangguh”. Variabel yang diukur pada *gatra* ideologi meliputi variabel kesetaraan akses, religiusitas dan toleransi. ketakwaan, kesamaan hak dalam konteks kewajiban sosial, solidaritas sosial, kesatuan wilayah, persatuan bangsa (nasionalisme) dan kekeluargaan.

Perlu kita ingat pula tanggung jawab terhadap negara ini bukanlah terletak pada para pemimpin ataupun aparat pemerintah saja, para pendahulu sudah memeberikan suri tauladan baiknya bahwa tanggung jawab keindonesiaan terletak pada pundak semua anak bangsa yang merasa dirinya masih dan akan terus sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula Menanamkan nilai-nilai pancasila dan mengobarkan semangat persatuan kesatuan bukan pula tanggung jawab dari guru ataupun dosen PPKn saja, sebagaimana kita pahami bersama pancasila milik semua masyarakat Indonesia maka dari itu pulalah semua bertanggung jawab atas keberlangsungan dan eksistensinya di bumi Indonesia. Marilah kita bersama-sama ikut dan mau tanggung jawab untuk memelihara warisan luhur para pendiri bangsa kita, jangan lah pernah sekali-kali kita punya pikiran dan upaya untuk mengabaikannya ataupun sampai menghilangkannya, warisan luhur itu amat sangatlah Indonesia perlukan dan harus pula bisa di wujudkan. Melihat tumpukan tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini, kita harus optimis dan pasti bisa melewati ujian yang ada. Dan ketika harapan masa depan yang lebih baik kembali menjadi cita-cita dan tujuan kita (Indonesia) bersama, maka membumikan pancasila menjadi satu solusinya jati diri bangsa itu perlu untuk di

wujudkan tidak untuk dipikirkan saja. Terakhir marilah kita simak kembali cuplikan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 “ Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara “ semua buat semua”, “satu buat semua, dan semua buat satu”.